

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Umum	
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah	
Sumber Data	: RPJMD Kab. Gunungkidul, Renstra Inspektorat Daerah	
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	
Sasaran Strategis	1. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat	
IKU Renstra OPD	<b>IKU</b>	
	2026	
IKK Kabupaten untuk Inspektorat Daerah	1 Nilai Maturitas SPIP	3,90
	1 Nilai AKIP PD	83
Program	2 Nilai Maturitas SPIP	3,9
	1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%
	2 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	100%
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%
	1 Nilai AKIP PD	83
	2 Nilai Maturitas SPIP	3,9
	1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%
	2 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	100%
	3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%

Dst  
 Gunungkidul, 14 Maret 2022  
 Plt. Inspektur  
  
 Saptoyo, S. Sos, M. Si  
 NIP. 197103251991011001



**Identifikasi Risiko Strategis Inspektorat Daerah**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY  
 Nama OPD : Inspektorat Daerah  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2021-2026)  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang Handal  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Umum

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k
1	<b>Tujuan:</b> Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang Handal								
	<b>Sasaran:</b> 1.1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	<b>Nilai Maturitas SPIP</b>	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Internal dan eksternal	C	Nilai maturitas SPIP terintegrasi rendah	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
	<b>Program:</b> 1.1.1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan:</b> 1.1.1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan:</b> 1.1.1.2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu di tindaklanjuti		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan					Inspektorat Daerah
	<b>Program:</b> 1.1.2. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang sudah melakukan manajemen resiko		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan:</b> 1.1.2.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan terlaksana		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan:</b> 1.1.2.2. Pendampingan dan Asistensi	Jumlah layanan pendampingan dan asistensi telaksana		Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan					Inspektorat Daerah
	<b>Sasaran:</b> 1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<b>Nilai AKIP PD</b>	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Internal dan eksternal	C	Nilai evaluasi LKJIP tidak sesuai target	Pemerintah Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	f	g	h	i	j	k
	<b>Program:</b> 1.2.1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana dengan Baik		Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan:</b> 1.2.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kepala Sub Bagian Perencanaan					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan :</b> 1.2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Disusun Tepat Waktu		Kepala Sub Bagian Perencanaan					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan :</b> 1.2.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		Kepala Sub Bagian Umum					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan :</b> 1.2.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan administrasi umum terlayani		Kepala Sub Bagian Umum					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan :</b> 1.2.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksana		Kepala Sub Bagian Umum					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan :</b> 1.2.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana		Kepala Sub Bagian Umum					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan :</b> 1.2.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Kepala Sub Bagian Umum					Inspektorat Daerah
	<b>Kegiatan :</b> 1.2.1.8. Penataan Organisasi	Jumlah dokumen layanan publik dan tata laksana yang tersusun		Kepala Sub Bagian Umum					Inspektorat Daerah

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Umum		
OPD yang Dinilai	: Inspektorat Daerah		
Sumber Data	Renja Inspektorat Daerah Tahun 2022		
Tujuan Strategis	Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal		
Program Inspektorat Daerah (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		
Keluaran/Hasil Kegiatan			
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>		
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</b>	100%
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	96 dokumen
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	84 auditan
		Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	4 dokumen
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	4 dokumen
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	30 dokumen
		Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	48 dokumen
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti</b>	12 dokumen
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	50 dokumen
		Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	1 dokumen
		Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	2 Dokumen
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN</b>		
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana</b>	4 dokumen
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	3 dokumen
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	2 dokumen
		Jumlah Dokumen telaahan staf	4 dokumen
	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana</b>	3 layanan
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen hasil asistensi/ pendampingan	96 dokumen

	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	2 dokumen
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	1 dokumen
		Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 dokumen
		Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK	4 dokumen
		Jumlah Dokumen monev gratifikasi	1 dokumen
		Jumlah Dokumen monev PMPRB	1 dokumen
		Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	7 dokumen
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	11 Layanan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	1 dokumen
		Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	2 dokumen
		Pelaksanaan Forum PD	1 kali
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 dokumen
		Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	1 dokumen
		Jumlah dokumen ROPK	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	1 dokumen
		Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	1 dokumen
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKjIP	1 dokumen
		Jumlah Laporan e-Monev	4 dokumen
		Jumlah Laporan TEPR	12 dokumen
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu</b>	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	26 bulan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	12 dokumen
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian</b>	0
	Pendataan dan Pengolahan	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi	49 ASN
		Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	30 Orang
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	27 orang
		Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4)	18 kali

	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum terlayani</b>	5 Layanan
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	3 jenis
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	10 jenis
		Jumlah belanja modal laptop Core i5	15 Unit
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	10 Jenis
	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah barang cetakan	5 jenis
		Jumlah penggandaan yang tersedia	6000 lembar
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	12 bulan
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	150 OR
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	60 OH
		Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	25 OH
		Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	150 OR
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana</b>	0 Unit
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	1 Unit
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana</b>	3 Layanan
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat tersedia	12 bulan
		Jumlah surat yang dikirim	60 surat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	12 bulan
		Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	12 bulan
		Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	12 bulan
	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	12 bulan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4 Layanan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara	8 unit
		Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	8 unit
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara	7 unit
		Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	7 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit
		Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	45 unit
		Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	2 unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	0 paket
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	15 unit

	Penataan Organisasi	Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	0 dokumen
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan	Jumlah dokumen RTP SPIP	1 dokumen
		Jumlah dokumen SOP	1 dokumen
		Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	2 dokumen
<p style="text-align: center;">Gunungkidul, 14 Maret 2022  Pit. Inspektur    Saptoyo S. Sesi, M. Si  NIP. 197103251991011001</p> 			

**Identifikasi Risiko Operasional Inspektorat Daerah**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY  
 Nama OPD : Inspektorat Daerah  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : 2022  
 Tujuan Strategis : Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal  
 Sasaran strategis OPD : Peningkatan penyelenggaraan pengawasan, perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu;  
 Peningkatan koordinasi penunjang urusan PD  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Umum

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
					Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	b	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti		Ketidaksiesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP		kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti			Keterlambatan penyajian tindak lanjut hasil pemeriksaan	
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	Pelaksanaan	Pengawasan tidak tepat sasaran	Auditor	Belum disusun manajemen risiko pada Auditan, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Auditan dan Inspektur		Pengawasan internal tidak optimal	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	Pelaksanaan	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Reviu	Inspektorat Daerah
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	Pelaksanaan	Pengawasan tidak tepat sasaran	Auditor	Belum disusun manajemen risiko pada Auditan, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Auditan dan Inspektur		Pengawasan internal tidak optimal	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
				Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	Pelaksanaan	Ketidaksiesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	Pelaksanaan	Keterbatasan waktu pelaksanaan reviu laporan keuangan	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Internal dan Eksternal	C	Reviu laporan keuangan tidak optimal	Inspektorat Daerah
				Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	Pelaksanaan	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Reviu	Inspektorat Daerah
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	Pelaksanaan	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Auditan tidak menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Reviu	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
					Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	b	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l
				Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Pelaksanaan	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman audit atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Pelaksanaan	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman audit atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Internal dan Eksternal	C	target waktu tindak lanjut tidak tercapai	Inspektorat Daerah
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	Pelaksanaan	Pelaksanaan pengasawan belum sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku	Inspektur	Kurangnya kompetensi auditor	Internal	C	Tujuan audit tidak tercapai	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Pemeriksaan tidak objektif	Inspektur	Fraud	Internal dan Eksternal	C	Tujuan audit tidak tercapai	Inspektorat Daerah dan Pemerintah Daerah
				Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	Pelaksanaan	Keterlambatan Penyusunan laporan	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi Satgas saber pungli	Internal dan Eksternal	C	target tidak tercapai	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	terjadinya kasus pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	Inspektur	Integritas SDM	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Negara
				Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	Pelaksanaan	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman audit atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Internal dan Eksternal	C	Keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah
				Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Pelaksanaan	Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Keterbatasan pengetahuan OPD	Internal dan Eksternal	C	Pengendalian atas risiko kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN											
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	Pelaksanaan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	Internal dan Eksternal	C	tujuan kebijakan teknis tidak tercapai secara optimal	Inspektorat Daerah
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	Pelaksanaan	Penetapan obyek pemeriksaan belum berdasarkan risiko	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Belum disusun manajemen resiko pada Audit, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Internal dan Eksternal	C	Pelaksanaan pemeriksaan tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Pelaksanaan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	Internal dan Eksternal	C	tujuan kebijakan teknis tidak tercapai secara optimal	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
					Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	b	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l
				Jumlah Dokumen telaahan staf	Pelaksanaan	Penyajian dokumen telaah staf tidak tepat waktu	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	internal	C	tujuan dokumen telaah staf tidak tercapai secara optimal	Inspektorat Daerah
		Pendampingan dan Asistensi		Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	Pelaksanaan	Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip	Inspektur	Perbedaan persepsi antar tim pendamping Kalurahan/OPD dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi	internal	C	Penurunan kepercayaan publik	Inspektorat Daerah
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	Pelaksanaan	Animo pegawai /masyarakat dalam melaporkan fraud rendah	Inspektur	Kurangnya pemahaman atas alur pelaporan dan ketakutan individu	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Negara
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	Pelaksanaan	Pelayanan Pemerintah daerah tidak obyektif	Inspektur	kurangnya pemahaman PD terhadap mekanisme penanganan benturan kepentingan	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Negara
				Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Pelaksanaan	Penyajian bukti dukung ZI / WBK / WBBM tidak tepat	Inspektur	Kurangnya pemahaman dari PD terpilih	Internal dan Eksternal	C	hasil evaluasi ZI WBK rendah	Pemerintah Daerah
				Jumlah Dokumen laporan movev Korsupgah KPK	Pelaksanaan	Penyajian bukti dukung MCP KPK tidak tepat	Inspektur	Kurangnya pemahaman dari PD terkait dan komitmen pimpinan belum	Internal dan Eksternal	C	Nilai movev Kopsurgah KPK rendah	Pemerintah Daerah
				Jumlah Dokumen movev gratifikasi	Pelaksanaan	belum semua PD melaporkan gratifikasi	Inspektur	kurangnya pemahaman PD terhadap Mekanisme pelaporan gratifikasi	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara	Masyarakat, Pemerintah Daerah, Negara
				Jumlah Dokumen movev PMPRB	Pelaksanaan	Penyajian bukti dukung PMPRB tidak tepat	Inspektur	Kurangnya pemahaman dari PD terpilih	Internal dan Eksternal	C	Hasil Evaluasi PMPRB rendah	Pemerintah Daerah
				Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	Pelaksanaan	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Internal dan Eksternal	C	Nilai maturitas SPIP terintegrasi rendah	Pemerintah Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Pelaksanaan	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	Sekretaris	Keterbatasan SDM	Internal	C	Penyelenggaraan pelayanan Publik tidak Optimal	Inspektorat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan	Sekretaris	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	Pelaksanaan	Penyajian data penyusun profil Inspektorat Daerah tidak tepat waktu	Kasubag Perencanaan	Kurangnya koordinasi internal	Internal	C	Penyajian profil PD tidak tepat waktu	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
					Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	b	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l
				Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	Pelaksanaan	Keterlambatan input perencanaan kegiatan dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Kasubag Perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	eksternal dan internal	C	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untuk entry ulang dan verifikasi	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Penetapan target capaian dalam Renja tidak tepat	Kasubag Perencanaan	Kurangnya koordinasi kepada pelaksana kegiatan	Internal	C	Target tidak tercapai	Inspektorat Daerah
				Pelaksanaan Forum PD	Pelaksanaan	Pelaksanaan Forum OPD tidak tepat waktu	Kasubag Perencanaan	Penjadwalan dari Bappeda	Eksternal	UC	Perencanaan kinerja tidak tepat waktu	Inspektorat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	internal	C	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	Kepala subbag perencanaan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	internal	C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Kepala subbag perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	eksternal dan internal	C	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untuk entry ulang dan verifikasi	Inspektorat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	internal	C	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	Kepala subbag perencanaan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	internal	C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Kepala subbag perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	eksternal dan internal	C	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untuk entry ulang dan verifikasi	Inspektorat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	internal	C	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	Kepala subbag perencanaan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	internal	C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Kepala subbag perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	eksternal dan internal	C	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untuk entry ulang dan verifikasi	Inspektorat Daerah
				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	Kepala Subbag Perencanaan	Petugas tidak teliti	Internal	C	Perbedaan penetapan tujuan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
				Jumlah dokumen ROPK	Pelaksanaan	Keterlambatan pembuatan ROPK	Kepala Subbag Perencanaan	belum ada di menu SIPD	eksternal	UC	Perencanaan pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
					Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	b	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l
					Pelaksanaan	Keterlambatan pembuatan ROPK	Kepala Subbag Perencanaan	perlu koordinasi dengan pihak lain	internal	C	Perencanaan pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	internal	C	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	Kepala subbag perencanaan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	internal	C	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Inspektorat Daerah
					Pelaksanaan	Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Kepala subbag perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	eksternal dan internal	C	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untuk entry ulang dan verifikasi	Inspektorat Daerah
				Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Pelaksanaan	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	Kepala Subbag Perencanaan	Petugas tidak teliti	Internal	C	Perbedaan penetapan tujuan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	Pelaksanaan	Keterlambatan penyusunan Dokumen LKJIP	Kepala Subbag Perencanaan	Memerlukan data lintas seksi	Internal	C	Nilai evaluasi LKJIP rendah	Inspektorat Daerah
				Jumlah Laporan e-Monev	Pelaksanaan	Entri terlambat	Kepala Subbag Perencanaan	Sering terjadi perubahan akibat sering terjadi perubahan juga DPA SKPD	Internal	C	Laporan agak terlambat	Inspektorat Daerah
				Jumlah Laporan TEpra	Pelaksanaan	Entri terlambat	Kepala Subbag Perencanaan	Anggaran Kas tidak sesuai realisasi kegiatan	Internal	C	Capaiannya kinerja rendah	Inspektorat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	Pelaksanaan	penatausahaan keuangan tidak akuntabel dan tepat waktu	Kepala Subbag Umum	verifikasi berjenjang dan koordinasi internal kurang optimal	Internal dan Eksternal	C	Merugikan Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah, Pemerintah Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	Pelaksanaan	Tunjangan kinerja terlambat	Kepala Subbag Umum	Regulasi tunjangan kinerja belum turun	Eksternal	C	Terlambatnya pembayaran tunjangan ASN	Inspektorat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Pelaksanaan	Terlambatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kepala Subbag Perencanaan	Dokumen pendukung belum lengkap	Internal	C	Pemotongan tunjangan kinerja ASN	Inspektorat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	Pelaksanaan	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	kepala Subbag Perencanaan	Dokumen pendukung belum lengkap	Internal	C	Pemotongan tunjangan kinerja ASN	Inspektorat Daerah
				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Pelaksanaan	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	kepala Subbag Perencanaan	Dokumen pendukung belum lengkap	Internal	C	Pemotongan tunjangan kinerja ASN	Inspektorat Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Pelaksanaan	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	Kasubag Umum	Kurangnya Koordinasi Internal	Internal	C	Penundaan hak kepegawaian pegawai Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			Dampak**)	
					Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	b	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi	Pelaksanaan	Terjadinya keterlambatan dalam urusan kepegawaian terhadap ASN misal Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun, kenaikan Jabatan	Kepala Subbag Umum	Belum dibuatnya penjagaan untuk Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun dan Kenaikan Jabatan terhadap ASN	Internal	C	Hak pegawai/ASN dilingkungan tidak terpenuhi tepat waktu	Inspektorat Daerah
				Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	Pelaksanaan	penilaian angka kredit tidak tepat waktu	Kasubag Umum	JFA dan PU2PD fokus kepada penyelesaian ketugasan	Internal	C	Kenaikan jabatan dan pangkat JFP dan P2UPD terlambat	Inspektorat Daerah
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	Pelaksanaan	jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas	Kasubag Umum	jumlah anggaran pengiriman diklat JFA dan P2UPD terbatas	Internal	C	Peningkatan kemampuan tidak optimal	Inspektorat Daerah
				Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4)	Pelaksanaan	jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi	Kasubag Umum	JFA dan PU2PD mengikuti ketugasan lain	Internal	C	Peningkatan kemampuan tidak optimal	Inspektorat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlayani	Pelaksanaan	pelayanan administrasi umum tidak optimal	Kasubag Umum	Keterbatasan anggaran	Internal dan Eksternal	C	pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	Pelaksanaan	Jumlah peralatan elektronika terbatas	Kepala Subbag Umum	Perubahan kebutuhan dan penyesuaian harga	Eksternal	C	Pelayanan terganggu karena tidak mempunyai genset	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	Pelaksanaan	Jumlah ATK yang tersedia terbatas	Kepala Subbag Umum	Terjadinya kenaikan/penurunan harga ATK	Eksternal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
				Jumlah belanja modal laptop Core i5	Pelaksanaan	Jumlah laptop yang tersedia terbatas	Kepala Subbag Umum	Anggaran untuk pengadaan laptop terbatas	Internal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	Pelaksanaan	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli terbatas	Kepala Subbag Umum	Terjadinya kenaikan/penurunan harga bahan dan peralatan kebersihan	Eksternal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Pelaksanaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia terbatas	Kepala Subbag Umum	Terjadinya kenaikan/penurunan harga barang cetakan	Eksternal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Pelaksanaan	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia terbatas	Kepala Subbag Umum	Terjadinya kenaikan/penurunan harga lembar penggandaan	Eksternal	C	Kinerja tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	Pelaksanaan	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	Kepala Subbag Umum	Minat baca terhadap surat kabar menurun	Internal dan Eksternal	C	penganggaran tidak tepat sasaran	Inspektorat Daerah
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	Pelaksanaan	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Jumlah tamu yang datang tidak sesuai dengan prediksi	Eksternal	C	fasilitasi minum snack untuk tamu tidak optimal	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
					Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	b	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	Pelaksanaan	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
				Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	Pelaksanaan	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
				Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	Pelaksanaan	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Pelaksanaan	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal	Kepala Subbagian Umum	Keterbatasan anggaran	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	Pelaksanaan	penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Kasubag Umum	adanya tambahan menu yang dibutuhkan pada aplikasi SIM HP	internal	C	pengadaan tidak tepat waktu	Inspektorat Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Pelaksanaan	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal	Kasubag Umum	Kurangnya koordinasi internal	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat tersedia	Pelaksanaan	Arsip KKA belum tertata secara optimal	Kepala Subbagian Umum	keterbatasan ruangan dan lemari arsip	Internal	C	Penelusuran berkas audit tidak efisien	Inspektorat Daerah
				Jumlah surat yang dikirim	Pelaksanaan	keterlambatan pengiriman surat	Kasubag Umum	Kelalaian Petugas	internal	C	tindak lanjut terlambat	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pelaksanaan	Pembayaran air terlambat	Kepala Subbagian Umum	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	Internal	C	Pemutusan air	Inspektorat Daerah
				Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pelaksanaan	Pembayaran listrik terlambat	Kepala Subbagian Umum	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	Internal	C	pemutusan listrik	Inspektorat Daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
					Tahap	Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	b	b	c	d	e	g	h	i	j	k	l
				Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pelaksanaan	Pembayaran telepon terlambat	Kepala Subbagian Umum	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	Internal	C	Pemutusan telepon	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	Pelaksanaan	Penyediaan bahan dan alat kebersihan tidak optimal		Perencanaan anggaran tidak sesuai kebutuhan	Internal	C	Kebersihan kantor tidak maksimal	Inspektorat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal	Kasubag Umum	Koordinasi internal tidak optimal	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Frekuensi penggunaan melebihi sehingga mudah rusak	Internal	C	Kenyamanan pemakai terganggu	Inspektorat Daerah
				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	Pelaksanaan	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas	Kepala Subbagian Umum	Kelalaian Petugas	Eksternal	C	Pembayaran denda keterlambatan	Inspektorat Daerah
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Frekuensi penggunaan melebihi sehingga mudah rusak	Internal	C	Kenyamanan pemakai terganggu	Inspektorat Daerah
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	Pelaksanaan	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas	Kepala Subbagian Umum	Kelalaian Petugas	Eksternal	C	Pembayaran denda keterlambatan	Inspektorat Daerah
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	Internal	C	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Inspektorat Daerah
				Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	Internal	C	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Inspektorat Daerah
				Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	Internal	C	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Inspektorat Daerah
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di	Internal	C	Pemeliharaan kurang optimal	Inspektorat Daerah
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	Pelaksanaan	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di	Internal	C	Ruangan Tidak Nyaman	Inspektorat Daerah
		Penataan Organisasi		Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	Pelaksanaan	Pelayanan dan tata laksana tidak optimal	Kasubag Umum	Koordinasi internal tidak optimal	Internal	C	Pelayanan publik tidak optimal	Inspektorat Daerah
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	Pelaksanaan	RTP SPIP belum diupdate sesuai perkembangan kegiatan	Kepala Subbagian Umum	Keterbatasan SDM	Internal	C	Pengendalian atas risiko kegiatan tidak optimal	Inspektorat Daerah



Hasil Analisis Risiko

Nama Perangkat Daerah	: Inspektorat Daerah							
Tahun Penilaian	: 2022							
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal							
Urusan Pemerintahan	: Peningkatan penyelenggaraan pengawasan, perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu;							
	: Urusan Pemerintahan Umum							
No.	Program	Kegiatan	"Risiko" yang Teridentifikasi			Analisis Risiko		
			Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b					c	d	e=cxd
<b>I</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>							
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP			
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	Pengawasan tidak tepat sasaran			
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	4	2	8
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	Pengawasan tidak tepat sasaran	4	4	16
				Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	3	3	9
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	Keterbatasan waktu pelaksanaan reviu laporan keuangan	4	4	16
				Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	4	3	12
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	3	3	9
				Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	3	3	9
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP			
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	Pelaksanaan pengasawan belum sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku	4	4	16
					Pemeriksaan tidak objektif	5	3	15
				Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	Keterlambatan Penyusunan laporan	3	2	6
					terjadinya kasus pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	5	3	15
				Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	3	3	9
				Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	4	4	16
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI							
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu			

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b					c	d	e=cxd
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	Penetapan obyek pemeriksaan belum berdasarkan risiko	4	4	16
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	3	3	9
				Jumlah Dokumen telaahan staf	Penyajian dokumen telaah staf tidak tepat waktu	3	3	9
		Pendampingan dan Asistensi		Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip			
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	Animo pegawai /masyarakat dalam melaporkan fraud rendah	3	4	12
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	Pelayanan Pemerintah daerah tidak obyektif	3	2	6
				Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Penyajian bukti dukung ZI / WBK / WBBM tidak tepat	3	3	9
				Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK	Penyajian bukti dukung MCP KPK tidak tepat	3	3	9
				Jumlah Dokumen monev gratifikasi	belum semua PD melaporkan gratifikasi	3	3	9
				Jumlah Dokumen monev PMPRB	Penyajian bukti dukung PMPRB tidak tepat	3	3	9
				Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	4	3	12
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	Penyajian data penyusun profil Inspektorat Daerah tidak tepat waktu	3	2	6
				Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	Keterlambatan input perencanaan kegiatan dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	3	2	6
					Penetapan target capaian dalam Renja tidak tepat	3	3	9
				Pelaksanaan Forum PD	Pelaksanaan Forum OPD tidak tepat waktu	3	3	9
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	4	2	8
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	4	3	12
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	3	2	6
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	4	2	8
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	4	3	12
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	3	2	6
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	4	2	8

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi				Analisis Risiko			
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b					c	d	e=cxd
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	4	3	12
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	3	2	6
				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	3	2	6
				Jumlah dokumen ROPK	Keterlambatan pembuatan ROPK	2	2	4
					Keterlambatan pembuatan ROPK	2	2	4
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	4	2	8
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	4	3	12
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	3	2	6
				Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	3	2	6
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	Keterlambatan penyusunan Dokumen LKJIP	3	2	6
				Jumlah Laporan e-Monev	Entri terlambat	3	2	6
				Jumlah Laporan TEPR	Entri terlambat	3	2	6
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	penatausahaan keuangan tidak akuntabel dan tepat waktu			
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	Tunjangan kinerja terlambat	3	2	6
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlambatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	3	2	6
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	3	2	6
				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	3	2	6
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu			
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi	Terjadinya keterlambatan dalam urusan kepegawaian terhadap ASN misal Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun, kenaikan Jabatan	3	2	6
				Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	penilaian angka kredit tidak tepat waktu	3	4	12
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas	3	4	12
				Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4)	jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi	3	2	6
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlayani	pelayanan administrasi umum tidak optimal			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	Jumlah peralatan elektronika terbatas	3	2	6
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	Jumlah ATK yang tersedia terbatas	3	2	6

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b					c	d	e=cxd
				Jumlah belanja modal laptop Core i5	Jumlah laptop yang tersedia terbatas	3	2	6
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli terbatas	3	2	6
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia terbatas	3	2	6
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia terbatas	3	2	6
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	3	2	6
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
				Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
				Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal			
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	penganggaran tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat tersedia	Arsip KKA belum tertata secara optimal	2	2	4
				Jumlah surat yang dikirim	keterlambatan pengiriman surat	3	2	6
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran air terlambat	3	2	6
				Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran listrik terlambat	3	2	6
				Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran telepon terlambat	3	2	6
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	Penyediaan bahan dan alat kebersihan tidak optimal	3	2	6
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal			
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas	3	2	6
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas	3	2	6
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
				Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	3	2	6

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi					Analisis Risiko		
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Resiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b					c	d	e=cxd
				Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	3	3	9
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	3	2	6
		Penataan Organisasi		Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	Pelayanan dan tata laksana tidak optimal			
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	RTP SPIP belum diupdate sesuai perkembangan kegiatan	4	3	12
				Jumlah dokumen SOP	Dokumen SOP belum diupdate sesuai perkembangan kebutuhan	3	2	6
				Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kuesioner tidak dapat terdistribusi ke sasaran tepat waktu	3	2	6
II	Risiko Strategis Inspektorat Daerah							
1	Sasaran: 1.1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat			Nilai Maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	4	4	16
2	Sasaran: 1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP PD	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	4	3	12

**Daftar Risiko Prioritas**

Nama Perangkat Daerah	: Inspektorat Daerah
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal
Urusan Pemerintahan	: Peningkatan penyelenggaraan pengawasan, perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
	: Urusan Pemerintahan Umum

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
I	<b>Risiko Operasional OPD</b>								
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Ketidaksesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP			kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Keterlambatan penyajian tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	Pengawasan tidak tepat sasaran		Auditor	Belum disusun manajemen resiko pada Auditan, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Pengawasan internal tidak optimal
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	8	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Reviu
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	Pengawasan tidak tepat sasaran	16	Auditor	Belum disusun manajemen resiko pada Auditan, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Pengawasan internal tidak optimal
				Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	Ketidaksuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	9	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	Keterbatasan waktu pelaksanaan reviu laporan keuangan	16	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Reviu laporan keuangan tidak optimal

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
				Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	12	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Reviu
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	9	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Auditan tidak menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu	Keterlambatan penerbitan Laporan Hasil Reviu
				Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	9	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP		Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	target waktu tindak lanjut tidak tercapai
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	Pelaksanaan pengasawan belum sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku	16	Inspektur	Kurangnya kompetensi auditor	Tujuan audit tidak tercapai
					Pemeriksaan tidak objektif	15	Inspektur	Fraud	Tujuan audit tidak tercapai
				Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	Keterlambatan Penyusunan laporan	6	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi Satgas saber pungli	target tidak tercapai
					terjadinya kasus pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	15	Inspektur	Integritas SDM	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara
				Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	Ketidaksesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	9	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Keterlambatan tindak lanjut hasil pemeriksaan

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
				Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	16	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Keterbatasan pengetahuan OPD	Pengendalian atas risiko kegiatan tidak optimal
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan terlaksana	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu		Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	tujuan kebijakan teknis tidak tercapai secara optimal
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	Penetapan obyek pemeriksaan belum berdasarkan risiko	16	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Belum disusun manajemen resiko pada Auditan, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Pelaksanaan pemeriksaan tidak optimal
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	9	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	tujuan kebijakan teknis tidak tercapai secara optimal
				Jumlah Dokumen telaahan staf	Penyajian dokumen telaah staf tidak tepat waktu	9	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	tujuan dokumen telaah staf tidak tercapai secara optimal
		Pendampingan dan Asistensi		Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip		Inspektur	Perbedaan persepsi antar tim pendamping Kalurahan/OPD dalam pelaksanaan pendampingan dan asistensi	Penurunan kepercayaan publik
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	Animo pegawai /masyarakat dalam melaporkan fraud rendah	12	Inspektur	Kurangnya pemahaman atas alur pelaporan dan ketakutan individu	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	Pelayanan Pemerintah daerah tidak obyektif	6	Inspektur	kurangnya pemahaman PD terhadap mekanisme penanganan benturan kepentingan	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
				Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Penyajian bukti dukung ZI / WBK / WBBM tidak tepat	9	Inspektur	Kurangnya pemahaman dari PD terpilih	hasil evaluasi ZI WBK rendah
				Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK	Penyajian bukti dukung MCP KPK tidak tepat	9	Inspektur	Kurangnya pemahaman dari PD terkait dan komitmen pimpinan belum optimal	Nilai monev Kopsurgah KPK rendah
				Jumlah Dokumen monev gratifikasi	belum semua PD melaporkan gratifikasi	9	Inspektur	kurangnya pemahaman PD terhadap Mekanisme pelaporan gratifikasi	Merugikan Masyarakat/Pemerintah Daerah/Negara
				Jumlah Dokumen monev PMPRB	Penyajian bukti dukung PMPRB tidak tepat	9	Inspektur	Kurangnya pemahaman dari PD terpilih	Hasil Evaluasi PMPRB rendah
				Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	12	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Nilai maturitas SPIP terintegrasi rendah
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu		Sekretaris	Keterbatasan SDM	Penyelenggaraan pelayanan Publik tidak Optimal
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan		Sekretaris	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	Penyajian data penyusun profil Inspektorat Daerah tidak tepat waktu	6	Kasubag Perencanaan	Kurangnya koordinasi internal	Penyajian profil PD tidak tepat waktu
				Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	Keterlambatan input perencanaan kegiatan dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	6	Kasubag Perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untuk entry ulang dan verifikasi

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
					Penetapan target capaian dalam Renja tidak tepat	9	Kasubag Perencanaan	Kurangnya koordinasi kepada pelaksana kegiatan	Target tidak tercapai
			Pelaksanaan Forum PD		Pelaksanaan Forum OPD tidak tepat waktu	9	Kasubag Perencanaan	Penjadwalan dari Bappeda	Perencanaan kinerja tidak tepat waktu
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	8	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	12	Kepala subbag perencanaan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	6	Kepala subbag perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untuk entry ulang dan verifikasi
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	8	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	12	Kepala subbag perencanaan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	6	Kepala subbag perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untuk entry ulang dan verifikasi
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	8	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Pertanggungjawaban tidak efisien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	12	Kepala subbag perencanaan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	6	Kepala subbag perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untu entry ulang dan verifikasi
				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	6	Kepala Subbag Perencanaan	Petugas tidak teliti	Perbedaan penetapan tujuan Perangkat Daerah
				Jumlah dokumen ROPK	Keterlambatan pembuatan ROPK	4	Kepala Subbag Perencanaan	belum ada di menu SIPD	Perencanaan pelaksanaan kegiatan tidak optimal
					Keterlambatan pembuatan ROPK	4	Kepala Subbag Perencanaan	perlu koordinasi dengan pihak lain	Perencanaan pelaksanaan kegiatan tidak optimal
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	8	Kepala subbag perencanaan	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Pertanggungjawaban tidak efiesien dan ekonomis serta berpotensi atas adanya temuan
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	12	Kepala subbag perencanaan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	6	Kepala subbag perencanaan	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Waktu pelaksanaan kegiatan mundur karena perlu waktu untu entry ulang dan verifikasi
				Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	6	Kepala Subbag Perencanaan	Petugas tidak teliti	Perbedaan penetapan tujuan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	Keterlambatan penyusunan Dokumen LKJIP	6	Kepala Subbag Perencanaan	Memerlukan data lintas seksi	Nilai evaluasi LKJIP rendah
				Jumlah Laporan e-Monev	Entri terlambat	6	Kepala Subbag Perencanaan	Sering terjadi perubahan akibat sering terjadi perubahan juga DPA SKPD	Laporan agak terlambat
				Jumlah Laporan TEpra	Entri terlambat	6	Kepala Subbag Perencanaan	Anggaran Kas tidak sesuai realisasi kegiatan	Capaiannya kinerja rendah

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	penatausahaan keuangan tidak akuntabel dan tepat waktu		Kepala Subbag Umum	verifikasi berjenjang dan koordinasi internal kurang optimal	Merugikan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	Tunjangan kinerja terlambat	6	Kepala Subbag Umum	Regulasi tunjangan kinerja belum turun	Terlambatnya pembayaran tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlambatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	6	Kepala Subbagian Perencanaan	Dokumen pendukung belum lengkap	Pemotongan tunjangan kinerja ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	6	kepala Subbagian Perencanaan	Dokumen pendukung belum lengkap	Pemotongan tunjangan kinerja ASN
				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	6	kepala Subbagian Perencanaan	Dokumen pendukung belum lengkap	Pemotongan tunjangan kinerja ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu		Kasubag Umum	Kurangnya Koordinasi Internal	Penundaan hak kepegawaian pegawai Inspektorat Daerah
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi	Terjadinya keterlambatan dalam urusan kepegawaian terhadap ASN misal Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun, kenaikan Jabatan	6	Kepala Subbag Umum	Belum dibuatnya penjaminan untuk Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun dan Kenaikan Jabatan terhadap ASN	Hak pegawai/ASN dilingkungan tidak terpenuhi tepat waktu
				Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	penilaian angka kredit tidak tepat waktu	12	Kasubag Umum	JFA dan PU2PD fokus kepada penyelesaian ketugasan	Kenaikan jabatan dan pangkat JFP dan P2UPD terlambat
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas	12	Kasubag Umum	jumlah anggaran pengiriman diklat JFA dan P2UPD terbatas	Peningkatan kemampuan tidak optimal

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
				Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4)	jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi	6	Kasubag Umum	JFA dan PU2PD mengikuti ketugasan lain	Peningkatan kemampuan tidak optimal
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlayani	pelayanan administrasi umum tidak optimal		Kasubag Umum	Keterbatasan anggaran	pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah tidak optimal
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	Jumlah peralatan elektronika terbatas	6	Kepala Subbag Umum	Perubahan kebutuhan dan penyesuaian harga	Pelayanan terganggu karena tidak mempunyai genset
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	Jumlah ATK yang tersedia terbatas	6	Kepala Subbag Umum	Terjadinya kenaikan/penurunan harga ATK	Kinerja tidak optimal
				Jumlah belanja modal laptop Core i5	Jumlah laptop yang tersedia terbatas	6	Kepala Subbag Umum	Anggaran untuk pengadaan laptop terbatas	Kinerja tidak optimal
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang dibeli terbatas	6	Kepala Subbag Umum	Terjadinya kenaikan/penurunan harga bahan dan peralatan kebersihan	Kinerja tidak optimal
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia terbatas	6	Kepala Subbag Umum	Terjadinya kenaikan/penurunan harga barang cetakan	Kinerja tidak optimal
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia terbatas	6	Kepala Subbag Umum	Terjadinya kenaikan/penurunan harga lembar penggandaan	Kinerja tidak optimal
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	6	Kepala Subbag Umum	Minat baca terhadap surat kabar menurun	penganggaran tidak tepat sasaran
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Jumlah tamu yang datang tidak sesuai dengan prediksi	fasilitasi minum snack untuk tamu tidak optimal
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
				Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
				Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal		Kepala Subbagian Umum	Keterbatasan anggaran	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	penganggaran tidak sesuai kebutuhan	6	Kasubag Umum	adanya tambahan menu yang dibutuhkan pada aplikasi SIM HP	pengadaan tidak tepat waktu
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak		Kasubag Umum	Kurangnya koordinasi internal	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat tersedia	Arsip KKA belum tertata secara optimal	4	Kepala Subbagian Umum	keterbatasan ruangan dan lemari arsip	Penelusuran berkas audit tidak efisien
				Jumlah surat yang dikirim	keterlambatan pengiriman surat	6	Kasubag Umum	Kelalaian Petugas	tindak lanjut terlambat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran air terlambat	6	Kepala Subbagian Umum	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	Pemutusan air
				Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran listrik terlambat	6	Kepala Subbagian Umum	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	pemutusan listrik

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
				Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran telepon terlambat	6	Kepala Subbagian Umum	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	Pemutusan telepon
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	Penyediaan bahan dan alat kebersihan tidak optimal	6		Perencanaan anggaran tidak sesuai kebutuhan	Kebersihan kantor tidak maksimal
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal		Kasubag Umum	Koordinasi internal tidak optimal	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Frekuensi penggunaan melebihi sehingga mudah rusak	Kenyamanan pemakai terganggu
				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas	6	Kepala Subbagian Umum	Kelalaian Petugas	Pembayaran denda keterlambatan
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Frekuensi penggunaan melebihi sehingga mudah rusak	Kenyamanan pemakai terganggu
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas	6	Kepala Subbagian Umum	Kelalaian Petugas	Pembayaran denda keterlambatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu
				Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu
				Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu

No	Risiko Prioritas					Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko				
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	9	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Pemeliharaan kurang optimal
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Ruangan Tidak Nyaman
		Penataan Organisasi		Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	Pelayanan dan tata laksana tidak optimal		Kasubag Umum	Koordinasi internal tidak optimal	Pelayanan publik tidak optimal
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	RTP SPIP belum diupdate sesuai perkembangan kegiatan	12	Kepala Subbagian Umum	Keterbatasan SDM	Pengendalian atas risiko kegiatan tidak optimal
				Jumlah dokumen SOP	Dokumen SOP belum diupdate sesuai perkembangan kebutuhan	6	Kepala Subbagian Umum	Keterbatasan SDM	Pengendalian atas risiko kegiatan tidak optimal
				Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kuesioner tidak dapat terdistribusi ke sasaran tepat waktu	6	Kepala Subbagian Umum	Populasi sebaran kuesioner sangat luas	Penyusunan SKM terlambat
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis Inspektorat Daerah</b>								
1	Sasaran: 1.1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat			Nilai Maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	16	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Nilai maturitas SPIP terintegrasi rendah
2	Sasaran: 1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP PD	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	12	Inspektur	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Nilai evaluasi LKJIP tidak sesuai target

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan  
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Perangkat Daerah	: Inspektorat Daerah
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah yang handal
	: Peningkatan penyelenggaraan pengawasan, perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Umum

No	Risiko Prioritas						Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Sebab					
I	<b>Risiko Operasional OPD</b>										
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Ketidakesuaian tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Koordinasi intensif dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyelesaian tindak lanjut	Kesalahan pemahaman	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut penyelesaian hasil rekomendasi / temuan atas setiap penugasan	Inspektur, Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan, Auditor	Januari-Desember
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah layanan penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah daerah	Pengawasan tidak tepat sasaran	Belum disusun manajemen resiko pada Auditan, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Penetapan Program kerja Pengawasan Tahunan	Penetapan PKPT berdasarkan faktor risiko	Pelaksanaan pendampingan Manajemen Risiko OPD sebagai dasar pelaksanaan PIBR	Inspektur	Januari-Desember
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah dan OPD yang direviu (KUA PAS murni dan perubahan, RKA murni dan perubahan dan Review BTT)	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Koordinasi dengan Obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyiapan bahan reviu	aturan kebijakan yang berubah	peningkatan koordinasi dengan penyampaian list bahan reviu kepada obyek pemeriksaan (auditan)	Kepala Subbag Perencanaan	Januari-Desember
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah objek pemeriksaan reguler dan pemeriksaan kinerja	Pengawasan tidak tepat sasaran	Belum disusun manajemen resiko pada Auditan, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Penetapan Program kerja Pengawasan Tahunan	Penetapan PKPT berdasarkan faktor risiko	Pelaksanaan pendampingan Manajemen Risiko OPD sebagai dasar pelaksanaan PIBR	Inspektur	Januari-Desember
				Jumlah obyek Evaluasi tindak lanjut	Ketidakesuai tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Koordinasi intensif dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyelesaian tindak lanjut	Kesalahan pemahaman	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut penyelesaian hasil rekomendasi / temuan atas setiap penugasan	Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan, Auditor	Januari-Desember
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen hasil reviu laporan keuangan Pemda	Keterbatasan waktu pelaksanaan reviu laporan keuangan	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Koordinasi dengan Obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyiapan bahan reviu	komitmen PD dan kesiapan SIM	Pelaksanaan asistensi atas laporan aset, laporan persediaan dan laporan keuangan OPD yang memiliki riwayat pelaporan terlambat	Inspektur	Januari-Desember
				Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah dan OPD yang direviu (RKPD murni dan perubahan; Renja murni dan perubahan)	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	Auditan belum lengkap menyajikan bahan reviu	Koordinasi dengan Obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyiapan bahan reviu	aturan kebijakan yang berubah	peningkatan koordinasi dengan penyampaian list bahan reviu kepada obyek pemeriksaan (auditan)	Inspektur Pembantu dan Auditor	Januari-Desember

No	Risiko Prioritas						Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Sebab					
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen review DAK dan review lainnya sesuai amanat pemerintah Kabupaten, Propinsi, dan Pusat	Pelaksanaan Reviu tidak tepat waktu	Audit tidak menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu	Koordinasi dengan Obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyiapan bahan reviu	aturan kebijakan yang berubah	peningkatan koordinasi dengan OPD secara berkala, untuk memastikan penyajian bahan reviu tepat waktu	Inspektur Pembantu dan Auditor	Januari-Desember
				Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Ketidaksihonestan tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Koordinasi intensif dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyelesaian tindak lanjut	Kesalahan pemahaman	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut penyelesaian hasil rekomendasi / temuan atas setiap penugasan	Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan, Auditor	Januari-Desember
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Dokumen hasil pengawasan dengan tujuan tertentu ditindaklanjuti	Ketidaksihonestan tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Koordinasi intensif dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyelesaian tindak lanjut	Kesalahan pemahaman	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut penyelesaian hasil rekomendasi / temuan atas setiap penugasan	Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan, Auditor	Januari-Desember
			Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen hasil Laporan pemeriksaan khusus	Pelaksanaan pengawasan belum sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku	Kurangnya kompetensi auditor	pembuatan Peta diklat	Keterbatasan anggaran	Penyesuaian anggaran diklat dan meningkatkan intensitas pelaksanaan PKS dan/atau focus group discussion	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Januari-Desember
					Pemeriksaan tidak objektif	Fraud	Pembuatan pernyataan independensi dan integritas pada setiap pelaksanaan pengawasan	Kepentingan pribadi	Peningkatan koordinasi dalam rangka internalisasi kode etik, penguatan WBS, Penguatan pelaporan gratifikasi, meminimalisir benturan kepentingan dalam pemeriksaan di lingkungan Inspektorat Daerah	Inspektur	Januari-Desember
				Jumlah Dokumen Laporan Saber Pungli	Keterlambatan Penyusunan laporan	Kurangnya koordinasi Satgas saber pungli	Koordinasi Satgas Saber pungli triwulanan	adanya pembatasan kegiatan masyarakat	Pelaksanaan koordinasi dilaksanakan dengan bergelombang untuk mengurangi kerumunan.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa	Januari-Desember
					terjadinya kasus pungli di Lingkungan Pemerintah Daerah	Integritas SDM	Pembentukan Satgas Saber Pungli	Keterbatasan pelaksanaan monitoring	Penguatan WBS, penanganan gratifikasi dan benturan kepentingan	Inspektur	Januari-Desember
				Jumlah dokumen tindak lanjut LHP BPK-RI sesuai rekomendasi	Ketidaksihonestan tindak lanjut dengan rekomendasi yang disajikan dalam LHP	kurangnya pemahaman auditan atas rekomendasi yang harus ditindaklanjuti	Koordinasi intensif dengan obyek pemeriksaan (auditan) terkait penyelesaian tindak lanjut	Kesalahan pemahaman	Penyusunan rencana aksi tindak lanjut penyelesaian hasil rekomendasi / temuan atas setiap penugasan	Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan, Auditor	Januari-Desember
				Persentase PD yang sudah melakukan manajemen risiko	Manajemen Risiko belum dilaksanakan oleh OPD	Keterbatasan pengetahuan OPD	melakukan sosialisasi terkait aturan manajemen resiko	aturan kebijakan yang berubah	melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan pada semua PD dalam penyusunan manajemen resiko	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa	

No	Risiko Prioritas					Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						Sebab
2	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	Koordinasi Internal	mandatoris dari pemerintah Pusat dan Propinsi DIY	Peningkatan koordinasi antar Inspektur pembantu dan Sekretariat	Sekretaris	Januari-Desember
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peta Pengawasan, Kendali Mutu Audit (KMA)	Penetapan obyek pemeriksaan belum berdasarkan risiko	Belum disusun manajemen resiko pada Auditan, sehingga perencanaan audit belum sepenuhnya berbasis risiko	Penetapan PKPT Tahunan	Penetapan PKPT berdasarkan faktor risiko	Pelaksanaan pendampungan Manajemen Risiko OPD sebagai dasar pelaksanaan PIBR	Inspektur	Januari-Desember
			Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen kebijakan teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Penyajian kebijakan teknis tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	Koordinasi internal antara semua Inspektur Pembantu dan Sekretaris	mandatoris dari pemerintah Pusat dan Propinsi DIY	Peningkatan koordinasi antar Inspektur pembantu dan Sekretariat	Kepala Sub bagian Perencanaan	Desember
				Jumlah Dokumen telaahan staf	Penyajian dokumen telaah staf tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi internal dan eksternal	Koordinasi internal antara semua Inspektur Pembantu dan Sekretaris	aturan kebijakan yang berubah	koordinasi lebih intensif	Inspektur Pembantu	Semester 1
		Pendampingan dan Asistensi		Jumlah layanan pendampingan dan asistensi terlaksana	Perbedaan rekomendasi atas kondisi yang sama/mirip	Perbedaan persepsi antar tim pendamping Kalurahan/OPD dalam pelaksanaan pendampingan dan	PKA	perbedaan persepsi	Pelaksanaan koordinasi sebelum pelaksanaan pendampingan dan asistensi	Inspektur Pembantu	Januari-Desember
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi Whistle Blower System	Animo pegawai /masyarakat dalam melaporkan fraud rendah	Kurangnya pemahaman atas alur pelaporan dan ketakutan individu	Penetapan Peraturan Bupati tentang Wistle Blower System	Belum tersosialisasi dengan optimal	Sosialisasi WBS, Sosialisasi media WBS, penetapan perlindungan pelapor	Inspektur	Januari-Desember
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan	Pelayanan Pemerintah daerah tidak obyektif	kurangnya pemahaman PD terhadap mekanisme penanganan benturan kepentingan	Penetapan Peraturan Bupati tentang Benturan Kepentingan	Belum tersosialisasi dengan optimal	Peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah	Inspektur pembantu	Januari-Desember
				Jumlah Dokumen hasil evaluasi Zona Integritas (ZI), Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Penyajian bukti dukung ZI / WBK / WBBM tidak tepat	Kurangnya pemahaman dari PD terpilih	Koordinasi dengan Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah	Peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah	Inspektur pembantu	Januari-Desember
				Jumlah Dokumen laporan monev Korsupgah KPK	Penyajian bukti dukung MCP KPK tidak tepat	Kurangnya pemahaman dari PD terkait dan komitmen pimpinan belum optimal	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi percontohan ZI WBK dan WBBM	adanya perubahan pengaturan tentang evaluasi dari Menan RB	Peningkatan koordinasi dengan TPI dan Perangkat Daerah yang menjadi percontohan ZI WBK dan WBBM	Inspektur pembantu	Januari-Desember
				Jumlah Dokumen monev gratifikasi	belum semua PD melaporkan gratifikasi	kurangnya pemahaman PD terhadap Mekanisme pelaporan gratifikasi	Koordinasi dengan Perangkat Daerah pengampu indikator pemenuhan dokumen Korsupgah KPK	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah pengampu dan perubahan indikator dokumen pemenuhan Korsupgah KPK	Peningkatan koordinasi Perangkat Daerah pengampu indikator pemenuhan dokumen Korsupgah KPK	Inspektur pembantu	Semester 1

No	Risiko Prioritas						Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Sebab					
				Jumlah Dokumen monev PMPRB	Penyajian bukti dukung PMPRB tidak tepat	Kurangnya pemahaman dari PD terpilih	Koordinasi dengan Perangkat Daerah	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah	Peningkatan sosialisasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah	Inspektur pembantu	Semester 1
				Jumlah hasil evaluasi maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi OPD terpilih maturitas SPIP	Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah dan perubahan aturan	Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menjadi OPD terpilih maturitas SPIP, salah satunya dengan pendampingan penyusunan MR	Inspektur pembantu	Semester 1
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan tidak sesuai ketentuan dan tidak tepat waktu	Keterbatasan SDM	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	Target waktu yang bersamaan	Koordinasi intern dalam rangka penyelesaian ketugasan	Sekretaris	Januari-Desember
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan anggaran tidak berdasarkan kebutuhan	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Koordinasi internal pembahasan perencanaan dan kebutuhan anggaran	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Perubahan perencanaan anggaran	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Juli 2022
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Profil PD	Penyajian data penyusun profil Inspektorat Daerah tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi internal	Koordinasi internal	Keterbatasan SDM	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan penyajian data	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Semester 1
				Jumlah dokumen Renja dan Renja Perubahan	Keterlambatan input perencanaan kegiatan dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Koordinasi dengan BKAD	sistem eror	Peningkatan koordinasi dengan BKAD dalam rangka antisipasi sistem eror	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Semester 1
					Penetapan target capaian dalam Renja tidak tepat	Kurangnya koordinasi kepada Pelaksana Kegiatan	Koordinasi Internal	keterbatasan waktu penyusunan	Peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dalam penetapan target	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Januari-Desember
				Pelaksanaan Forum PD	Pelaksanaan Forum OPD tidak tepat waktu	Penjadwalan dari Bappeda	Berdasarkan jadwal dari BAPPEDA	Keterlambatan pelaksanaan	Peningkatan koordinasi dengan BAPPEDA	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Semester 1
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Pencantuman anggaran dengan SHBJ terbaru	Perubahan peraturan	Persiapan perubahan perencanaan anggaran	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Semester 1
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Koordinasi internal pembahasan perencanaan dan kebutuhan anggaran	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Perubahan perencanaan anggaran	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Semester 1
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Koordinasi dengan BKAD	sistem eror	Peningkatan koordinasi dengan BKAD dalam rangka antisipasi sistem eror	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Semester 1
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Pencantuman anggaran dengan SHBJ terbaru	Perubahan peraturan	Persiapan perubahan perencanaan anggaran	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Juli 2022

No	Risiko Prioritas					Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						Sebab
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Koordinasi internal pembahasan perencanaan dan kebutuhan anggaran	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Perubahan perencanaan anggaran	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Juli 2022
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Koordinasi dengan BKAD	sistem eror	Peningkatan koordinasi dengan BKAD dalam rangka antisipasi sistem eror	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Juli 2022
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Koordinasi internal	Keterbatasan SDM	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan penyajian data	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Desember 2022
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Koordinasi dengan BKAD	sistem eror	Peningkatan koordinasi dengan BKAD dalam rangka antisipasi sistem eror	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Desember 2022
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Koordinasi Internal	keterbatasan waktu penyusunan	Peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dalam penetapan target	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Desember 2022
				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	Petugas tidak teliti	Penyajian target kinerja dalam renja	ketelitian petugas	Verifikasi berjenjang pada pembuatan perjanjian kinerja	Sekretaris	Januari-Desember
				Jumlah dokumen ROPK	Keterlambatan pembuatan ROPK	belum ada di menu SIPD	risiko diterima				
					Keterlambatan pembuatan ROPK	perlu koordinasi dengan pihak lain	risiko diterima				
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ	SHBJ terbaru belum tersosialisasikan	Koordinasi internal	Keterbatasan SDM	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan penyajian data	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Juli 2022
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil	Kesalahan perhitungan atas kebutuhan anggaran	Koordinasi dengan BKAD	sistem eror	Peningkatan koordinasi dengan BKAD dalam rangka antisipasi sistem eror	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Juli 2022
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)	Dua aplikasi SIPD dan SIPKD belum bisa saling link	Koordinasi Internal	keterbatasan waktu penyusunan	Peningkatan koordinasi dengan pelaksana kegiatan dalam penetapan target	Kasubbag Perencanaan, Sekretaris	Juli 2022
				Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja	Petugas tidak teliti	Penyajian target kinerja dalam renja	ketelitian petugas	Verifikasi berjenjang pada pembuatan perjanjian kinerja	Sekretaris	Januari-Desember
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	Keterlambatan penyusunan Dokumen LKJIP	Memerlukan data lintas seksi	Penetapan target waktu penyelesaian LKJIP	Keterbatasan SDM	Peningkatan koordinasi dalam rangka pengumpulan data bukti dan pembuatan laporan	Kasubag Perencanaan	Semester 1
				Jumlah Laporan e-Monev	Entri terlambat	Sering terjadi perubahan akibat sering terjadi perubahan juga DPA SKPD	Koordinasi dengan BKAD	Koordinasi kurang optimal	Pemantapan kualitas koordinasi dengan BKAD	Kasubag Perencanaan	Semester 1
				Jumlah Laporan TEPR	Entri terlambat	Anggaran Kas tidak sesuai realisasi kegiatan	Koordinasi dengan para Inpentur Pembantu dan Kasubag Umum dan Evalap	Anggaran tidak cukup	Mengutamakan program /kegiatan yang bersifat urgent	Kasubag Perencanaan	Semester 1

No	Risiko Prioritas						Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Sebab					
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	penatausahaan keuangan tidak akuntabel dan tepat waktu	verifikasi berjenjang dan koordinasi internal kurang optimal	SOP penatausahaan keuangan	Keterbatasan waktu dan perubahan kebijakan	Peningkatan koordinasi dalam rangka verifikasi dan percepatan penyajian laporan keuangan	Sekretaris	Januari-Desember
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	Tunjangan kinerja terlambat	Regulasi tunjangan kinerja belum turun	SOP penatausahaan keuangan	Perubahan kebijakan	Peningkatan koordinasi dengan BKPPD	Kasubag Perencanaan	Semester 1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlambatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen pendukung belum lengkap	Penetapan target waktu penyelesaian Laporan Keuangan	Perubahan Kebijakan dan Kesiapan SIM	Peningkatan koordinasi dengan penyusun laporan keuangan dan BKAD	Kasubag Perencanaan	Semester 1
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Dokumen pendukung belum lengkap	Koordinasi dengan Pelaksana Kegiatan	Kurangnya pemahaman pengampu program/kegiatan	Peningkatan koordinasi dengan pengampu program/kegiatan terkait target waktu pelaporan	Kasubag Perencanaan	Semester 1
				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen pendukung belum lengkap	Koordinasi dengan Pelaksana Kegiatan	Kurangnya pemahaman pengampu program/kegiatan	Peningkatan koordinasi dengan pengampu program/kegiatan terkait target waktu pelaporan	Kasubag Perencanaan	Semester 1
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu	Kurangnya Koordinasi Internal	Koordinasi internal	Belum ada buku penjaminan kepegawaian	Pembuatan buku penjaminan kepegawaian dan mengupayakan penjaminan proses kepegawaian secara kontinu (antara lain dengan SIM)	Sekretaris	Desember 2022
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi	Terjadinya keterlambatan dalam urusan kepegawaian terhadap ASN misal Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun, kenaikan Jabatan	Belum dibuatnya penjaminan untuk Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun dan Kenaikan Jabatan terhadap ASN	Koordinasi internal	Belum ada buku penjaminan kepegawaian	Pembuatan buku penjaminan kepegawaian dan mengupayakan penjaminan proses kepegawaian secara kontinu (antara lain dengan SIM)	Kasubag Umum	Desember 2022
				Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	penilaian angka kredit tidak tepat waktu	JFA dan PU2PD fokus kepada penyelesaian ketugasan	Penjaminan terhadap rencana usulan PAK seriap Auditor dan P2 UPD	Kelalaian Petugas dan keterbatasan waktu dalam mengolah informasi	Peningkatan koordinasi intern dalam rangka Penilaian Angka Kredit	Kasubag Umum	Desember 2022
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas	jumlah anggaran pengiriman diklat JFA dan P2UPD terbatas	Peta Diklat	Keterbatasan anggaran	Mengintensifkan PKS dan FGD serta mengupayakan peningkatan anggaran	Kasubag Umum	Desember 2022
				Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4)	jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi	JFA dan PU2PD mengikuti ketugasan lain	Jadwal PKS	Pelaksanaan ketugasan mendesak	Koordinasi internal untuk meningkatkan komitmen kehadiran PKS	Kasubag Umum	Desember 2022

No	Risiko Prioritas						Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Sebab					
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum terlayani	pelayanan administrasi umum tidak optimal	Keterbatasan anggaran	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	Jumlah peralatan elektronika terbatas	Perubahan kebutuhan dan penyesuaian harga	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	Jumlah ATK yang tersedia terbatas	Terjadinya kenaikan/penurunan harga ATK	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
				Jumlah belanja modal laptop Core i5	Jumlah laptop yang tersedia terbatas	Anggaran untuk pengadaan laptop terbatas	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli terbatas	Terjadinya kenaikan/penurunan harga bahan dan peralatan kebersihan	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia terbatas	Terjadinya kenaikan/penurunan harga barang cetakan	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia terbatas	Terjadinya kenaikan/penurunan harga lembar penggandaan	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi	Minat baca terhadap surat kabar menurun	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Jumlah tamu yang datang tidak sesuai dengan prediksi	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
				Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
				Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022

No	Risiko Prioritas					Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko						Sebab
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal	Keterbatasan anggaran	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	penganggaran tidak sesuai kebutuhan	adanya tambahan menu yang dibutuhkan pada aplikasi SIM HP	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal	Kurangnya koordinasi internal	Perencanaan dan penganggaran Tahun 2022	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat tersedia	Arsip KKA belum tertata secara optimal	keterbatasan ruangan dan lemari arsip	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Keterbatasan anggaran	Koordinasi internal untuk penyusunan arsip yang lebih baik	Kasubbag Umum	Desember 2022
				Jumlah surat yang dikirim	keterlambatan pengiriman surat	Kelalaian Petugas	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	komitmen individu	Peningkatan Koordinasi intern	Kasubbag Umum	Januari-Desember
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran air terlambat	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	komitmen individu	Peningkatan Koordinasi intern	Kasubbag Umum	Januari-Desember
				Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran listrik terlambat	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	komitmen individu	Peningkatan Koordinasi intern	Kasubbag Umum	Januari-Desember
				Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran telepon terlambat	petugas lalai melakukan pembayaran, anggaran belum bisa direalisasikan, perencanaan penganggaran yang kurang cermat	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	komitmen individu	Peningkatan Koordinasi intern	Kasubbag Umum	Januari-Desember
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	Penyediaan bahan dan alat kebersihan tidak optimal	Perencanaan anggaran tidak sesuai kebutuhan	Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2022	Kebutuhan masih dinamis, masih ada yang belum masuk list	penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal	Koordinasi internal tidak optimal	RKBMD Pemeliharaan	Keterbatasan anggaran	Koordinasi internal dalam rangka penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Frekuensi penggunaan melebihi sehingga mudah rusak	RKBMD Pemeliharaan	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Koordinasi internal dalam rangka penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022
				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas	Kelalaian Petugas	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	komitmen individu	Peningkatan Koordinasi intern	Kasubbag Umum	Januari-Desember

No	Risiko Prioritas						Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Sebab						
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Frekuensi penggunaan melebihi sehingga mudah rusak	RKBMD Pemeliharaan	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Koordinasi internal dalam rangka penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022	
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas	Kelalaian Petugas	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	komitmen individu	Peningkatan Koordinasi intern	Kasubbag Umum	Januari-Desember	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharaannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	RKBMD Pemeliharaan	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Koordinasi internal dalam rangka penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022	
				Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharaannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	RKBMD Pemeliharaan	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Koordinasi internal dalam rangka penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022	
				Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharaannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Penggunaan yang terus menerus sehingga mudah rusak	RKBMD Pemeliharaan	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Koordinasi internal dalam rangka penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	RKBMD Pemeliharaan	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Koordinasi internal dalam rangka penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharaannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	Perubahan kebutuhan sesuai dengan perkembangan di tahun berjalan	RKBMD Pemeliharaan	Perubahan kebutuhan dan perubahan standar biaya	Koordinasi internal dalam rangka penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum	Juli 2022	
		Penataan Organisasi		Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	Pelayanan dan tata laksana tidak optimal	Koordinasi internal tidak optimal	Target waktu penyelesaian pekerjaan	Keterbatasan SDM	Peningkatan koordinasi Internal	Kasubbag Umum	Januari-Desember	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	RTP SPIP belum diupdate sesuai perkembangan kegiatan	Keterbatasan SDM	Target waktu penyelesaian pekerjaan	Keterbatasan SDM	Peningkatan koordinasi Internal	Kasubbag Umum	Januari-Desember	
				Jumlah dokumen SOP	Dokumen SOP belum diupdate sesuai perkembangan kebutuhan	Keterbatasan SDM	Target waktu penyelesaian pekerjaan	Keterbatasan SDM	Peningkatan koordinasi Internal	Kasubbag Umum	Januari-Desember	
				Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kuesioner tidak dapat terdistribusi ke sasaran tepat waktu	Populasi sebaran kuesioner sangat luas	SOP	Keterbatasan SDM	Peningkatan koordinasi Internal	Kasubbag Umum	Januari-Desember	
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis Inspektorat Daerah</b>	0	0	0	0							
1	Sasaran: 1.1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	0	0	0	Nilai Maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Sosialisasi SPIP	Perubahan peraturan penilaian Maturitas SPIP	Peningkatan sosialisasi maturitas SPIP terintegrasi	Inspektur	Desember 2022

No	Risiko Prioritas						Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Sebab					
2	Sasaran: 1.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	0	0	Nilai AKIP PD	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Kurangnya pemahaman dan komitmen PD	Sosialisasi evaluasi LKJIP	Perubahan peraturan evaluasi LKJIP	Peningkatan sosialisasi evaluasi LKJIP dan mendorong perbaikan dalam proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Inspektur	Desember 2022



No	"Risiko" yang Teridentifikasi				Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Tanggal terjadi	Sebab					
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ							
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil							
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)							
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ							
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil							
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)							
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ							
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil							
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)							
				Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja							
				Jumlah dokumen ROPK	Keterlambatan pembuatan ROPK							
					Keterlambatan pembuatan ROPK							
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPPA	Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan SHBJ							
					Ketidaksesuaian penyajian anggaran dengan kebutuhan riil							
					Keterlambatan input anggaran dalam sistem (SIPD dan SIPKD)							
				Jumlah dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja	Ketidaksesuaian penyajian perjanjian kinerja dengan Target dalam Renja							
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJIP	Keterlambatan penyusunan Dokumen LKJIP							
				Jumlah Laporan e-Monev	Entri terlambat							
				Jumlah Laporan TEPR	Entri terlambat							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen laporan keuangan disusun tepat waktu	penatausahaan keuangan tidak akurat dan tepat waktu							
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terfasilitasi gaji dan tunjangan ASN (50 x 14 bulan)	Tunjangan kinerja terlambat							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Terlambatnya penyusunan laporan keuangan akhir tahun							
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan/SPJ	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Bulanan							
				Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Terlambatnya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	Penyajian administrasi kepegawaian tidak tepat waktu							
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN tertangani/terfasilitasi	Terjadinya keterlambatan dalam urusan kepegawaian terhadap ASN misal Kenaikan Pangkat Jabfung, KGB, Pensiun, kenaikan Jabatan							
				Jumlah JFA dan P2UPD yang mendapat penilaian angka kredit	penilaian angka kredit tidak tepat waktu							
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan Bimtek Peningkatan kualitas aparat pengawasan	jumlah JFA dan P2UPD yang terkirim terbatas							
				Jumlah aparat pengawasan mendapatkan pelatihan di kantor sendiri/PKS (40 orang x 4)	jumlah JFA dan P2UPD yang mengikuti PKS tidak terpenuhi							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah layanan administrasi umum terlayani	pelayanan administrasi umum tidak optimal							
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan listrik dan elektronika kantor tersedia (lampu, kabel, fitting dll)	Jumlah peralatan elektronika terbatas							
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (kertas A4, F4, bolpen, pensil, cutter, toner, clip dll)	Jumlah ATK yang tersedia terbatas							
				Jumlah belanja modal laptop Core i5	Jumlah laptop yang tersedia terbatas							
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan yang terbeli terbatas							
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jumlah barang cetakan yang tersedia terbatas							
				Jumlah penggandaan yang tersedia	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia terbatas							
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia (1 eksemplar x 12 bulan)	Surat Kabar tidak dibaca setiap edisi							
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah minuman dan snack tamu	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan							
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas dalam daerah	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan							
				Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas, perjalanan dinas luar daerah	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan							
				Jumlah minuman dan snack tersedia untuk rapat-rapat	Penganggaran tidak sesuai kebutuhan							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan terlaksana	Pengadaan BMD Penunjang tidak optimal							
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah pengadaan SIM HP	penganggaran tidak sesuai kebutuhan							

No	"Risiko" yang Teridentifikasi					Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Risiko	Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	Pelaksanaan layanan penunjang Pemerintah Daerah tidak Optimal								
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat tersedia	Arsip KKA belum tertata secara optimal								
				Jumlah surat yang dikirim	keterlambatan pengiriman surat								
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Sarana jasa air yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran air terlambat								
				Jumlah Sarana jasa listrik yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran listrik terlambat								
				Jumlah Sarana jasa telepon yang tersedia (1 Rekening x 12)	Pembayaran telepon terlambat								
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor dibayar	Penyediaan bahan dan alat kebersihan tidak optimal								
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah tidak optimal								
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas roda 2 terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan								
				Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang terbayar pajaknya	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas								
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan								
				Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terbayar pajaknya	Keterlambatan pembayaran pajak mobil dinas								
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah komputer yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan								
				Jumlah laptop yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan								
				Jumlah printer yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor terpelihara	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan								
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah AC yang terfasilitasi pemeliharannya	Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan								
		Penataan Organisasi		Jumlah dokumen pelayanan publik dan tata laksana yang tersusun	Pelayanan dan tata laksana tidak optimal								
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen RTP SPIP	RTP SPIP belum diupdate sesuai perkembangan kegiatan								
				Jumlah dokumen SOP	Dokumen SOP belum diupdate sesuai perkembangan kebutuhan								
				Jumlah dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kuesioner tidak dapat terdistribusi ke sasaran tepat waktu								
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis Inspektoral Daerah</b>	0		0	0								
1	Sasaran: 1.1. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat	0		0	Nilai Maturitas SPIP	Internalisasi pengendalian intern di lingkungan Perangkat Daerah belum optimal							
2	Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.2. 0		0	Nilai AKIP PD	Perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal							